

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya jua, Laporan Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2022 ini dapat kami selesaikan secara tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan hadirnya beliau ke dunia ini membawa cahaya yang dapat menerangi kegelapan di alam semesta.

Laporan kinerja yang disusun ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Bappeda di tahun 2022. Tahun yang penuh dengan dinamika sehingga semua SKPD harus melakukan penyesuaian terkait dengan kondisi pandemi dan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, serta Kepmendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 yang merubah kodifikasi dan nomenklatur program dan kegiatan yang berimbas pada penyesuaian yang memakan energi yang luar biasa banyaknya dari semua SKPD. Sebuah fenomena yang secara kasat mata menyebabkan menurunnya intensitas kegiatan pada semua sektor. Dengan kondisi yang demikian maka penggambaran terhadap bagaimana kinerja Bappeda Tanah Laut pada tahun 2022 kami harapkan dapat tergambar pada laporan kinerja ini.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Bappeda

The image shows a circular official stamp of Bappeda Tanah Laut. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT" at the top and "BAPPEDA TANAH LAUT" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp has the word "BAPPEDA" in a bold, sans-serif font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Andris Evony, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19790928 199711 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja Bappeda selama tahun anggaran 2022.

Tahun Anggaran 2022 ini dapat dikatakan masih adanya dinamika eksternal seperti terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi Permendagri 50-5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sistem aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian oleh semua SKPD termasuk Bappeda. Penyesuaian-penyesuaian tersebut membuat kinerja Bappeda mau tidak mau mengalami penurunan akselerasi karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan aturan-aturan baru.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

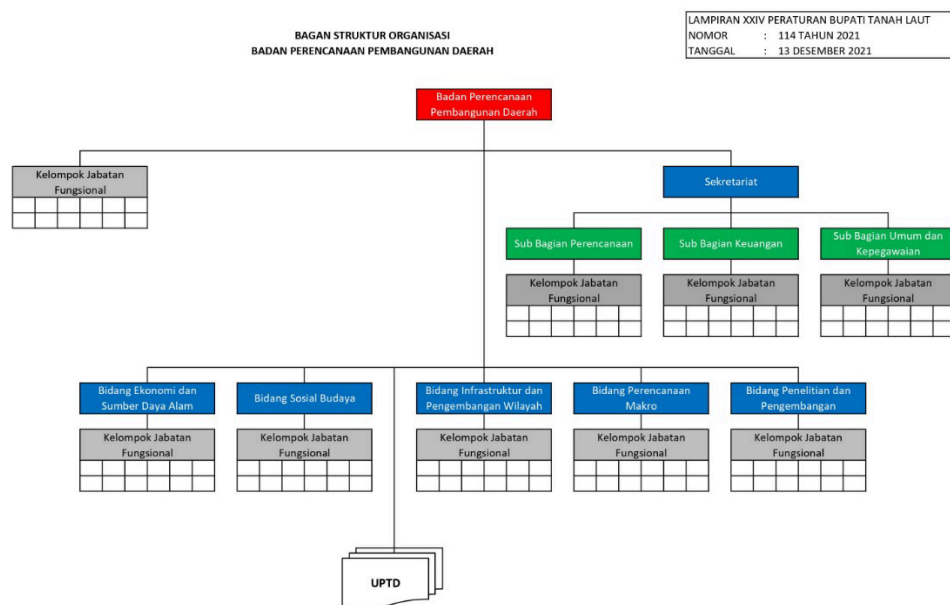
Tujuan penyusunan Laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan

- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK BAPPEDA dapat dilihat pada bagan berikut :



Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa Bappeda Tanah Laut dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang kasubbag dan dibantu pula oleh 5 (lima) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi Jabatan Fungsional dan staf. Selain itu, Bappeda dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun detail numenklatur tiap jabatan yang ada di Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, yang membawahi 3 orang Kasubbag yaitu :
 - 1) Kasubbag Perencanaan

- 2) Kasubbag Keuangan
- 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Kepala Bidang Perencanaan Makro
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.
- e. Pembinaan UPT Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detil, setiap jabatan yang ada di Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
- a) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
 - g) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
- 3) pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten serta Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya;
- 6) pelaksanaan Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;

- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah, pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 2) memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 3) pengoordinasian, penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan materi dan substansi untuk pelaksanaan Perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 6) pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di KabupatenTanah Laut pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 8) pelaksanaan pengendalian/monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber

daya alam;

- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- 10) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) pemverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 7) pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perencanaan Makro

Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan makro pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pendanaannya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
- 4) pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- 6) pemantauan, evaluasi, analisis dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 3) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam, teknologi dan inovasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang sosial dan budaya;
- 4) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 5) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 6) pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan

masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.

Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Terkait Kelompok Jabatan Fungsional ini terdapat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis

internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi / permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat ada 5 (Lima) akar masalah yang sampai saat ini masih ditemukan, yaitu:

1. Belum optimalnya Kualitas SDM perencana.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang menyusun sebuah perencanaan akan sangat menentukan kualitas perencanaan yang dihasilkan. Untuk menjadi seorang perencana tidaklah mudah. Diperlukan pemahaman terhadap agenda besar yang diinginkan oleh Pemerintah daerah. Agenda besar tersebut adalah RPJMD. Didalamnya telah dituangkan seluruh target capaian yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 Tahun. Adanya tujuan, sasaran, indikator dan target harus betul betul difahami oleh para perencana baik pada SKPD Bappeda sendiri ataupun oleh para perencana yang ada di SKPD. Secara mendasar Bappeda memiliki cukup ketergantungan dengan para perencana di SKPD karena semua arahan dan pengendalian yang disampaikan harus diejawantahkan oleh para perencana SKPD kedalam indikator-indikator sasaran yang termuat dalam Renstra dan Renja. Sinkronisasi antara Bappeda dan para perencana SKPD inilah yang diperlukan untuk melahirkan sebuah perencanaan yang berkualitas, yaitu perencanaan yang selaras dengan RPJMD.

Sudah menjadi masalah klasik bahwa penempatan para ASN perencana di SKPD seringkali berubah dari waktu ke waktu. Perencana yang awalnya sudah mulai memahami tugas dan kewajibannya seringkali kemudian mengalami perpindahan tugas apakah karena mutasi ataupun promosi jabatan sehingga akan datang para perencana baru yang belum memiliki kemampuan dan pemahaman sebagaimana perencana sebelumnya. Hal ini salah satu sebab mengapa pembinaan keperencanaan Bappeda kepada para perencana di SKPD senantiasa mengalami pasang surut. Kondisi ini menyebabkan penyusunan perencanaan setiap tahun seringkali pula

terpengaruh dengan penggantian posisi seorang perencana di SKPD, disamping memang secara alami selalu ada perbedaan kualitas keterampilan dari setiap perencana.

2. Belum dijadikannya Musrenbang sebagai pintu masuk utama penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang semestinya merupakan sarana yang sangat tepat untuk langkah awal menyusun perencanaan setiap tahunnya. Dalam mekanisme musrenbang ini sebenarnya sudah terakomodasi berbagai pendekatan yang memungkinkan disusunnya perencanaan secara matang. Dalam musrenbang terdapat mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planing), mekanisme perencanaan dari atas (top down planning), mekanisme perencanaan teknokratis, dan mekanisme politis. Pada mekanisme bottom up, masyarakat mempunyai jalur untuk menyampaikan aspirasinya, keinginannya yang memang telah dibicarakan pada tingkat desa saat dilaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kecamatan. Pada mekanisme top down, Pemerintah dan SKPD mempunyai jalur untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah dan pemerintah di atasnya. Pada mekanisme teknokratis, Para cendekiawan dan publik dapat menyampaikan usulan yang relatif telah matang dipandang dari sudut pandang teknis perencanaannya. Pada Mekanisme politis, para wakil rakyat memiliki pintu masuk untuk menyampaikan keinginan para konstituennya. Semua sudah memiliki pintu masuk melalui musrenbang pada beberapa tingkatannya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa banyak usulan masyarakat yang hilang entah kemana padahal telah tersaring secara baik di level desa dan kecamatan. Padahal sebenarnya masyarakatlah yang tahu dengan kondisi di level akar rumput. Kadang terjadi ego sektoral sehingga justru perencanaan top planning lebih dominan dan mekanisme politik juga tak kalah meramaikan riuhnya pembahasan usulan kegiatan. Adanya usulan masyarakat yang langsung ke SKPD, langsung ke pimpinan daerah, atau ke wakil rakyat menambah rumitnya penyusunan perencanaan. Bappeda menjadi pihak yang disalahkan masyarakat karena dinilai tak mampu menjaga kontinuitas usulan masyarakat sehingga pameo bahwa "Musrenbang

hanya formalitas dan tidak ada gunanya” dimata masyarakat menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Ketika ini terjadi, kembali Bappeda yang harus babak belur menerima semua yang dikeluhkan semua pihak.

3. Belum optimalnya pengendalian dalam penyusunan perencanaan.

Dalam prakteknya, penyusunan perencanaan melalui berbagai tahap, dari perencanaan awal dimana SKPD diasistensi renjanya dan kemudian diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan. Setelah pagu disampaikan maka kembali dilakukan rasionalisasi usulan oleh masing-masing SKPD. Hasil rasionalisasi tadi kemudian diinput kedalam SIPD. Sayangnya setelah proses input selesai seringkali terjadi pengendalian menjadi sulit dilakukan karena biasanya batas waktu penginputan yang sangat terbatas dan terkesan kejar tayang. Ada beberapa titik krusial dimana pengendalian sebenarnya bisa dilakukan tetapi menjadi tidak dapat dilakukan oleh Bappeda. Titik pertama berada pada saat renja sudah diasistensi dan perencanaan awal berupa kegiatan disusun. Bappeda tidak dapat menjamin bahwa hasil asistensi dipatuhi oleh SKPD. Titik kedua terjadi pada saat kegiatan sudah disusun oleh SKPD sesuai pagu tentatif. Saat inipun Bappeda tidak memiliki mekanisme pengendalian untuk menjamin bahwa usulan kegiatan berdasarkan pagu masih sesuai dengan renja yang sudah diasistensi Bappeda. Titik ketiga terjadi pada saat penginputan. Kembali Bappeda tidak memiliki mekanisme bahwa apa yang diinput oleh SKPD adalah sesuai kesepakatan saat asistensi. Mungkin tidak semua titik krusial bisa terbaca oleh Bappeda, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui ketidakpatuhan terhadap hasil asistensi. Salah satunya dengan mengusulkan kegiatan yang kurang penting dan kemudian mengusulkan penambahan anggaran melalui Telaahan Staf yang kemudian berkembang secara liar hingga pembengkakan anggaran melambung melebihi proyeksi anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Fenomena yang nampak kemudian adalah RKPD tidak sesuai lagi dengan KUPA-PPAS. Ada banyak tambahan kegiatan yang tidak diketahui asal muasalnya dan SKPD terkesan menjadikan Telaahan Staf kepada Pimpinan Daerah sebagai jalan keluar untuk mewujudkan keinginan. Keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan.

4. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.

Hal mendasar yang menyebabkan perencanaan menjadi tidak berkualitas karena tidak selaras dengan Agenda Besar 5 Tahunan Pemerintah Daerah yaitu RPJMD. Masih terdapat belasan SKPD yang belum sinkron Renstranya dengan RPJMD dan masih terdapat 17 sasaran RPJMD yang masih belum tercapai hingga memasuki tahun empat RPJMD 2018-2023. Apabila hal ini tidak segera diluruskan maka dampak yang muncul adalah tidak sinkronnya kegiatan SKPD dengan Tujuan dan Target Pemerintah Daerah yang secara jelas telah dituangkan dalam RPJMD. Anggaran menjadi percuma digelontorkan karena membiayai berbagai kegiatan yang kontennya tidak selaras dengan keinginan RPJMD. Menselaraskan renstra dan Renja SKPD dengan Sasaran-sasaran dan target RPJMD menjadi hal yang harus segera dilakukan oleh Bappeda Tanah Laut.

5. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan waktu, kabupaten Tanah Laut yang dulu pernah jaya dengan kayu ulinnya, kemudian terganti dengan batubara dan biji besi kini terasa belum terpetakan kemana akan terbawa arahnya apabila sawit dan karet dan jagung dan komoditi lainnya juga akan mengalami penurunan produksi. Pemerintah perlu segera mencari alternatif pendapatan untuk mempersiapkan perkembangan di masa mendatang. Tidak hanya terkait dengan alternatif potensi, kondisi alam yang seringkali tak bersahabat di musim hujan juga memiliki potensi untuk menurunkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, adanya pemikiran, penelitian dan pengembangan menjadi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi sesuatu ancaman ataupun memanfaatkan sebuah peluang. Dengan penelitian dan pengembangan maka kesalahan langkah akan dapat dihindarkan. Dengan penelitian dan pengembangan akan membuka peluang yang bisa jadi belum terpikirkan. Selain apa yang dikemukakan diatas, tupoksi Bappeda dalam melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan menghajatkan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan

mesti diberikan porsi yang besar. Saat ini masih dirasakan bahwa peran penelitian dan pengembangan belum tergali secara optimal. Untuk itu perhatian terhadap program penelitian dan pengembangan perlu lebih dioptimalkan lagi. Dengan kualitas penelitian yang baik akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Tanah Laut di masa yang akan datang.

Dari beberapa permasalahan diatas, Bappeda memandang perlu untuk mengangkat 2 (dua) isu strategis saat ini, yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

D. Produk dan Layanan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Bab II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa Produk Layanan Bappeda meliputi:

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ;
4. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Dokumen-dokumen Hasil Kajian.

E. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan
 - 3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan
 - 3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan
 - 4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro
 - 5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - 6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
 - 7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Sosial Budaya
 - 8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertanda tangan
- 4. Cascading/Pohon Kinerja
- 5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 adalah :

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” yang merupakan akronim dari Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi”.

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah dirancanglah 5 buah Misi yaitu:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan penacapaian misi ke-3 yaitu : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”.

Tata kelola pemerintahan yang baik berawal dari penyusunan perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang baik dapat diukur dari beberapa aspek yang seringkali disingkat “SMART” yaitu Specific (khusus/focus), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai) dan Timebound (Batas Waktu).

Sejauh mana Bappeda mampu menjadi SKPD koordinator sektor perencanaan semua SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut akan menentukan kualitas perencanaan yang akan tersusun. Tersusunnya perencanaan yang berkualitas akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan karena dalam prosesnya, tata kelola pemerintahan memerlukan perencanaan yang baik pula.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Rumusan tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah.

Kualitas perencanaan yang baik akan sangat menentukan kualitas pembangunan yang dihasilkan. Kualitas perencanaan dan pembangunan yang baik ini akan dapat didorong secara optimal apabila didukung dengan kualitas kelitbangan yang baik pula. Untuk itu, guna mewujudkan pembangunan yang baik sesuai arahan RPJMD diperlukan kualitas perencanaan yang baik yang didukung dengan kualitas kelitbangan yang baik pula.

2. Sasaran Strategis

- 1) Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan atau kesesuaian antara perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan SKPD dengan sasaran-sasaran yang ada di dalam RPJMD. Sasaran ini juga mengarah pada kesesuaian program RKPd dengan RPJMD. Indikatornya dilihat dari jumlah program yang ada di RKPd yang dilaksanakan oleh Bappeda dengan program perencanaan dan kelitbangan yang ada di RPJMD.

- 2) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup bidang Sosial Budaya dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Sosial Budaya dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi bidang Sosial Budaya.

- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Ekonomi dan SDA dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Ekonomi dan SDA.

- 4) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- 5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui sumbangsih hasil kajian-kajian yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam penyempurnaan penyusunan perencanaan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.

- 6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SKPD baik secara administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta penyusunan perencanaan dan

pelaporan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga mencapai akuntabilitas yang baik yang diukur dengan Nilai SAKIP SKPD.

Penjabaran tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPd dengan RPJMD.	100 %	Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	90	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
				Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	80	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
			Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	- Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD - Persentase program yang memenuhi target	80 80	Meningkatkan Pengendalian evaluasi Kinerja SKPD lingkup Kabupaten.	Peningkatan koordinasi dengan SKPD se Kabupaten.
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup	- Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial	80	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.

			Sosial budaya	Budaya. - Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	80	Sosial Budaya.	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	- Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD - Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	80 80	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPD - Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	80 80	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian - Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun - Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 	<p style="text-align: center;">80</p> <p style="text-align: center;">75</p> <p style="text-align: center;">75</p> <p style="text-align: center;">75</p>	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan, pelaporan dan keuangan SKPD	Meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan SKPD
	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan.	100 %	Meningkatnya implementasi hasil penelitian Pembangunan Daerah.	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	80	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan order dari pimpinan daerah kepada sebuah SKPD. IKU merupakan locator dimana SKPD tersebut harus berkiprah dan memberikan andilnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dari IKU ini pula dapat diketahui core bussines sebuah SKPD. Berdasarkan analisa terhadap tuntutan kinerja yang dikaitkan dengan produk layanan Bappeda maka untuk tahun 2022 telah ditetapkan adanya 1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tanah Laut yaitu : “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbang daerah”.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka Bappeda juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2022. Perjanjian Kinerja ditanda tangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Eselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, Bappeda juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub bagian (Eselon IV) dengan Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan format pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Perjanjian Kinerja SKPD BAPPEDA adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator kinerja program dan kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Persentase Perencanaan RKPD yang sesuai dengan RPJMD.
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan.	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian SKPD. 2. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun. 3. Persentase Laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan. 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
			100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
			100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
			Nilai SAKIP A	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kinerja Sumber Daya Manusia.

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD.
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
3	Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan	1. Persentase Keselarasan program yang dilaksanakan	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Jumlah program SKPD yang memenuhi target

	Pengendalian program SKPD dengan RPJMD.	SKPD terhadap program yang ada di RPJMD 2. Persentase program yang memenuhi target	100	Pembangunan Daerah.	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPd dan RKPd Perubahan
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah rapat monev per triwulan (4 kali rapat).
					Jumlah rapat koordinasi DAK dan dokumen usulan DAK.
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Review RPJMD.
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
4	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya. 	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
			100	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
5	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD. 2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA. 	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
			100	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPd. 2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
			100	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
7.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian bidang perencanaan yang diwujudkan.	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	Persentase Hasil Penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan.
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

F. Program dan Kegiatan

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.098.960.974,-	8.411.218.290,-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.501,-	9.999.501,-
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.501,-	4.999.501,-
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.809.154.465,-	6.290.154.465,-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.799.156.390,-	6.279.156.390,-
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.998.075,-	10.998.075,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,-	15.000.000,-
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,-	15.000.000,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.061.246,-	1.140.021.316,-
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.655.959,-	24.655.959,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.434.449,-	103.286.519,-
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.500.838,-	55.608.838,-
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	3.480.000,-
	5. Penyediaan Bahan/Material	0,-	13.000.000,-
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.990.000,-	939.990.000,-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.524.698,-	324.880.141,-
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.524.698,-	324.880.141,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.277.417,-	469.277.417,-
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.352.500,-	118.352.500,-
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,-	350.924.917,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.943.647,-	161.885.450,-
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.998.152,-	14.048.716,-
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.195.495,-	102.236.734,-
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-	45.600.000,-

2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	677.911.641,-	650.126.753,-
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	495.391.641,-	476.606.753,-
	1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	495.391.641,-	476.606.753,-
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	100.000.000,-
	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100.000.000,-	100.000.000,-
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	82.520.000,-	82.520.000,-
	1. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	82.520.000,-	82.520.000,-
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	116.141.641,-	146.476.998,-
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	39.999.289,-	29.085.036,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.900,-	4.121.889,-
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.999.775,-	7.439.775,-
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.954,-	4.999.954,-
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.999.660,-	12.523.418,-
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	38.755.096,-	80.373.231,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.846,-	52.711.600,-
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.999.432,-	8.905.813,-
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.764.611,-	3.764.611,-
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.991.207,-	14.991.207,-
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	37.387.256,-	37.018.731,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.988,-	1.999.472,-
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	10.050.988,-	13.879.472,-

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.565.140,-	16.389.647,-
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.870.140,-	4.750.140,-
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	135.905.488,-	44.236.413,-
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	40.586.701,-	0,-
	1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	40.586.701,-	0,-
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	45.320.000,-	15.010.000,-
	1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	45.320.000,-	15.010.000,-
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	49.998.787,-	29.226.413,-
	1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	49.998.787,-	29.226.413,-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Bappeda Tanah Laut melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 7.098.960.974,-, dan pada APBD Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp. 8.411.218.290,-.

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja ini diketahui bahwa :

1. Pada Anggaran Murni tahun 2022, Bappeda mengelola Anggaran sebesar Rp. 8.028.919.744,- dan Anggaran tersebut kemudian terkoreksi kembali meningkat pada APBD Perubahan 2022 menjadi menjadi Rp9.282.058.454,-.
2. Hasil serapan keuangan pada anggaran tahun 2022 adalah sebesar 91,27% yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2021 sebesar 78,25% ini berarti terjadi kenaikan serapan sekitar 13,02%.
3. Hasil realisasi fisik pada anggaran tahun 2022 adalah sebesar 99,21% yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2021 sebesar 97,31% ini berarti terjadi peningkatan kinerja fisik sekitar 1,9%. Kenaikan ini juga tidak signifikan.
4. Pada laporan kinerja tahun 2022 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV pada sekretariat, sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

B. Strategi Peningkatan Kinerja.

Berdasarkan penelaahan terhadap kinerja SKPD yang diuraikan diatas dapat disampaikan beberapa strategi peningkatan Kinerja pada Bappeda Tanah Laut yaitu :

1. Penyusunan anggaran yang lebih efisien dan efektif lagi terutama pada bidang-bidang yang serapan anggarannya belum maksimal. Penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran pada zona nyaman dan cenderung sama dan rutin setiap tahun.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

RPJMD merupakan dokumen yang sangat penting dari semua SKPD yang didalamnya terdapat indikator-indikator yang harus diwujudkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksinya. Sasaran RPJMD yang menjadi core bussines BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah adalah **“Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten dengan target memperoleh nilai BB”**. Sampai dengan tahun 2022, nilai SAKIP BB ini sudah tercapai dan masih dalam katagori nilai 77,2 (BB) sehingga tugas bagi BAPPEDA untuk mempertahankan dalam mencapai peningkatan nilai SAKIP ini menuju nilai A. Perlu diketahui bahwa indikator sasaran nilai SAKIP A ini bukan hanya diampu oleh BAPPEDA sendiri tetapi melibatkan 2 SKPD lainnya yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka mewujudkan peran BAPPEDA dalam meningkatkan nilai SAKIP kabupaten tersebut BAPPEDA melakukan beberapa upaya yang erat kaitannya dengan tupoksi BAPPEDA di bidang Perencanaan. Untuk itu BAPPEDA menetapkan 6 sasaran yaitu :

- 1) Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Keselarasan antara perencanaan dan Pengendalian program SKPD dengan RPJMD ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Bagaimana mungkin sasaran di RPJMD terkait urusan perencanaan dan kelitbangan daerah dapat diwujudkan apabila tidak terdapat keselarasan dengan perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan oleh SKPD oleh Bappeda. Harus terdapat benang merah yang nantinya akan menjadi indikator bagi bahwa semua program yang dilaksanakan di SKPD memang telah selaras atau sesuai denga amanah RPJMD yang telah dijabarkan lebih detil pada

Renstra dan Renja SKPD. Sasaran ini menjadi Kinerja Utama pada Bidang Perencanaan Makro Bappeda Tanah Laut.

- 2) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Kinerja Utama yang harus dilaksanakan oleh 3 Bidang pada Bappeda yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Simpul dari ketiga bidang ini merupakan konsekwensi logis dari pelaksanaan Permendagri 90 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengamanahkan bahwa Indikator pada beberapa sub kegiatan hanya diwadahi dalam 1 Indikator Kegiatan, sehingga baik bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi & SDA maupun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terikat pada 1 Kinerja saja yaitu Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketiga Bidang tersebut hanya berbeda pada penggarapan bidangnya saja sesuai tupoksinya.

- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA.

Sama dengan uraian tersebut pada nomor 2 diatas, kinerja utama dari bidang Ekonomi dan SDA mempunyai peran untuk Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah khusus pada bidang Ekonomi dan SDA.

- 4) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran ini merupakan kinerja utama dari bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam upaya untuk Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- 5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penelitian dan Pengembangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan pengembangan akan menghasilkan kajian-kajian

yang sangat berguna bagi penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas dan dapat memberi kontribusi bagi dikurangnya kesalahan dalam penyusunan perencanaan. Penelitian dan Pengembangan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini menjadi kinerja utama Sekretariat Bappeda. Indikator dari pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD ini dapat dilihat dari peningkatan nilai SAKIP SKPD. Upaya utama yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu. Selain itu juga ditunjang oleh berbagai program kesekretariatan yang menjamin berjalannya pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan kelancaran aktivitas perkantoran lainya secara baik dan efisien.

Sebelum memasuki pada uraian secara detil tentang akuntabilitas kinerja personil Bappeda dari Eselon II hingga eselon III perlu disepakati terlebih dahulu tentang katagori penilaian berdasarkan skala yang dapat dipertanggungjawabkan. Skala penilaian yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja personil Bappeda menggunakan skala yang diambil dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan skala sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Dengan menggunakan skala ini diharapkan penilaian mandiri yang dilakukan menjadi lebih objektif dan lebih jelas pengklasifikasiannya.

2. Indikator Sasaran

Pada bab ini juga diuraikan Indikator Sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran ke 1.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2. Indikator Sasaran ke 2.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

3. Indikator Sasaran ke 3.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase program yang memenuhi target	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Indikator Sasaran ke 4

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Indikator Sasaran ke 5

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Indikator Sasaran ke 6

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Keselarasan Renja SKPD Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPd.	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Indikator Sasaran ke 7

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Indikator Sasaran ke 8

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Indikator Sasaran ke 9

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

10. Indikator Sasaran ke 10

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya implementasi hasil penelitian Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

11. Indikator Sasaran ke 11

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

12. Indikator Sasaran ke 12

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

13. Indikator Sasaran ke 13

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini

termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

14. Indikator Sasaran ke 14

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	100

Sesuai tabel diatas pencapaian target sasaran ini dari target 100% terealisasi 100% dan untuk menunjang pencapaian target ini termuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat).

Untuk uraian lebih mendalam dalam pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada uraian masing pengampu dikarenakan keberhasilan suatu target ditunjang juga kegiatan yang dilaksanakan yang tercantum dalam DPA badan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2022.

3. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan.

a. analisis

Akuntabilitas Kepala Bappeda dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Demikian juga halnya dengan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretaris dan para Kepala Bidang. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Target	Target	realisasi	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase perencanaan RKPD yang sesuai dengan RPJMD.	100	100	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	100	100	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)

Sasaran eselon II : Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD pembangunan dan kelitbangan daerah.

Indikator 1 : Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD.

Pencapaian indikator I sesuai dengan tabel data pada tahun 2021 target persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 100% dan untuk mencapai indikator ini didukung dengan jumlah program sebanyak 4 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.196.552.357,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 48 orang, eselon III sebanyak 6 orang, eselon IV sebanyak 15 orang staf sebanyak 13 orang, serta PTT sebanyak 14 orang.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian persentase perencanaan kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan jumlah program sebanyak 4 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.252.058.454,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 48 orang, eselon III sebanyak 6 orang, eselon IV sebanyak 3 orang staf sebanyak 13 orang, serta PTT sebanyak 14 orang.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Target	Target	realisasi	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase perencanaan RKPD yang sesuai dengan RPJMD.	100	100	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan penurunan capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :
 1. Lambatnya SKPD dalam melakukan penginputan ke Sistem;
 2. permasalahan SDM.
- b. Solusi :
 1. lebih cermat lagi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi yang ada;
 2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD;
 2. Agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab.
- c. Rencana aksi

Dalam hal ini rencana aksi yang diterapkan seperti dilakukan survey dan rapat dengan SKPD terkait terlebih dahulu untuk

kegiatan monitoring dan evaluasi, untuk penganggaran makan minum dipusatkan ke sekretariat dan untuk kegiatan yang memang belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih kurang stabilnya proses pendemik. Selain itu permasalahan Sumber Daya Manusia khususnya SDM perencana yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan dibidang perencanaan, diharapkan kedepannya permasalahan ini dapat segera terselesaikan.

Sasaran eselon II : Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD pembangunan dan kelitbangan daerah.

Indikator II : Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan yang sesuai dengan RPJMD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 347.461.130,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kabid, 2 orang kasubbid, 2 orang staf.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.236.413,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang kabid dan 4 orang staf.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkat nya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	100	80	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan penurunan capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1. kesulitan dalam pengumpulan/permintaan data kepada SKPD;
 2. kurangnya pemahaman kepada SKPD pentingnya kajian/penelitian yang sebenarnya sangat berpengaruh pada pembangunan.
- b. Solusi :
1. Senantiasa memberikan himbauan pada setiap kesempatan bertemu dengan SKPD akan pentingnya kajian yang akan dilakukan oleh Bappeda.
 2. Mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mengumpulkan data dalam arti meminta data jauh-jauh hari ke SKPD sehingga SKPD mempunyai waktu untuk menyiapkan data yang diminta.
- c. Rencana aksi
1. Melaksanakan rapat Internal dengan seluruh bidang-bidang di BAPPEDA.
 2. Melibatkan unsur pimpinan tertinggi dalam penandatanganan surat undangan.
 3. Rapat koordinasi dengan konsultan Terkait data yang diperlukan.
 4. Menyusun jadwal follow-up perkembangan hasil kajian.

Kepala Bappeda mengampu 4 Program untuk mewujudkan sasaran strategis Bappeda yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah. Adapun Program-program yang diampu oleh Kepala Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	677.911.641,-	650.126.753,-	423.886.098,-	100	65,20
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	116.141.641,-	146.476.998,-	98.905.010,-	100	67,52
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.098.960.974,-	8.411.218.290,-	7.889.206.077,-	100	93,79
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	135.905.488,-	44.236.413,-	32.210.600,-	100	72,81

b. Kendala

Berdasarkan tabel pada analisis, Akuntabilitas Kinerja Kepala Bappeda dapat dilihat dari serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan dari 4 Program yang dilaksanakan. Dengan ini maka apabila dirata-ratakan serapan anggaran yang berhasil dicapai adalah 91,27% dari target 100 persen yang dimuat dalam perjanjian kinerja.

Namun, apabila dilihat dari realisasi fisik kegiatan maka data realisasi fisik yang dicapai menunjukkan semua program kegiatan mencapai 99,21%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target fisik kegiatan dapat tercapai meskipun dana yang terserap hanya berkisar 91,27%. Penyerapan anggaran yang lebih kecil dibanding realisasi fisik

ini sebagian besar disebabkan oleh sudah cukup dalam kegiatan FGD pengambilan kesimpulan Review Master Plan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022. Akibatnya, anggaran makan minum, narasumber, ATK, tidak dapat direalisasikan. Dengan kata lain, terjadi efisiensi anggaran, dimana biaya yang semestinya dikeluarkan bisa tidak perlu dikeluarkan, namun hasil yang ingin dicapai tetap dapat diperoleh. Dengan demikian, berdasarkan skala yang sudah disampaikan diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bappeda Tanah Laut dilihat dari sisi serapan anggaran dapat dikatakan berkategori SANGAT TINGGI, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi realisasi fisik kegiatan.

4. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan.

a. Analisis

Akuntabilitas sekretaris dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75	85	75	85	Persentase capaian meningkat dibandingkan target (75)

Sasaran eselon III : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD

Indikator 1 : Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian.

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian yang sesuai 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 4 program, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.043.643.090,-, sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf, serta 4 orang PTT. Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.411.218.290,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf, serta 4 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 1. kurang cermatnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
 2. permasalahan SDM
- b. Solusi :
 1. lebih cermat lagi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi setiap tahunnya.
 2. agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Rencana aksi

Dalam hal ini rencana aksi yang diterapkan seperti penganggaran makan minum kembali dan untuk kegiatan yang memang belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih adanya pasca pandemi agar ditiadakan. Selain itu permasalahan SDM yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan sesuai dengan tugasnya.

Indikator 2 : Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.140.506,-, sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar 9.999.501,-, sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV, 2 Staf CPNS dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1. SDM yang ada masih memahami kegiatan yang dilaksanakan karena 2 staf masih CPNS
2. perbaikan dalam tahapan pelaporan

b. Solusi :

agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Rencana aksi

permasalahan SDM yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan sesuai dengan tugasnya

Indikator 3 : Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.086.320,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.998.075,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian target yang disebabkan beberapa hal.

Pada capaian sasaran ini tidak terdapat kendala yang begitu signifikan dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin mengenai penyusunan laporan keuangan

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) adanya pergantian sistem keuangan
- 2) SDM yang belum banyak mengetahui tentang sistem keuangan yang baru
- 3) Jaringan internet yang lambat

Solusi :

- 1) Adanya penetapan sistem mana yang harus digunakan
- 2) Adany pelatihan apabila ada pergantian sistem keuangan
- 3) Bandwith internet perlu ditambah

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak koordinasi kepada SKPD yang mengurus masalah keuangan terkait penggunaan system
- 2) Penyediaan pelatihan bagi SDM

Indikator 4 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nilai 85 untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.157.056,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang staf.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terealisasi sebesar nilai 85 untuk mencapai idikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.111.064.324,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	85	75	85	Persentase capaian meningkat

		Instansi Pemerintah					dibandingkan target (75)
--	--	------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan kenaikan capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1. kurangnya pemahaman mengenai penyusunan lakip
2. kurangnya SDM dalam mewujudkan sasaran ini

b. Solusi :

1. agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Adanya pelatihan mengenai penyusunan lakip

c. Rencana aksi

permasalahan SDM yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan mengenai penyusunan lakip.

Sekretaris Bappeda mengampu 1 Program untuk mewujudkan sasaran Kinerja Sekretaris Bappeda yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Adapun program yang diampu oleh Sekretaris Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.	Nilai SAKIP A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.411.218.290,-	7.889.206.077,-	100	93,79
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.501,-	8.991.000,-	100	89,91
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.450,-	204.509.871,-	100	83,45
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.819.000,-	100	96,38

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.290.154.465,-	6.014.910.243,-	100	95,62
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.279.156.390,-	6.004.281.043,-	100	95,62
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.998.075,-	10.629.200,-	100	96,65
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,-	600.000,-	100	4,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,-	600.000,-	100	4,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.021.316,-	1.020.566.663	100	89,52
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.655.959,-	22.798.000,-	0	92,46
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.286.519,-	88.532.347,-	0	85,72
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.608.838,-	50.362.928,-	0	90,57
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	360.000,-	100	10,34
			Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,-	13.000.000,-		100

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	939.990.000,-	845.513.388,-	100	89,95
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.880.141,-	302.984.000,-		93,26
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.880.141,-	302.984.000,-		93,26
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.277.417,-	434.253.071,-		92,54
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.352.500,-	84.658.922,-		71,53
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,-	349.594.149,-		99,62
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.885.450,-	106.901.100,-		66,04
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.048.716,-	13.658.500,-		97,22
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	102.236.734,-	60.720.100,-		59,39

			Operasional atau Lapangan				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000,-	32.522.500,-		71,32

b. Kendala

Dari tabel analisis dapat diketahui bahwa Sekretaris Bappeda mengampu 1 program yang dilaksanakan jika dirata-ratakan dengan program yang dilaksanakan tersebut maka serapan anggaran dari 1 program tersebut mencapai 93,79% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 95,24%. Dari angka 93.07 ini maka akuntabilitas kinerja Sekretaris Bappeda berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan berkategori SANGAT TINGGI, dari sisi serapan anggaran, dan berkategori SANGAT TINGGI pula dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan.

Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada, maka dalam hal ini untuk pencapaian target sekretaris yang dibantu oleh beberapa kasubbag/ eselon IV dan dapat dijabarkan pada penjelasan berikut :

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

a. Analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	2587	2587	2587	2587	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD	69	69	69	69	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.043.643.090,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eslon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.020.566.663,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eslon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	100	100	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target dan tidak ada kendala yang ditemui karena semua yang dilaksanakan bersifat rutin.

Indikator 2 : Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.043.643.090,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eslon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

2.111.064.324,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eslon IV, 1 Orang ASN dan 6 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD	100	100	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target dan tidak ada kendala yang ditemui karena semua yang dilaksanakan bersifat rutin

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.021.316,-	1.020.566.663,-	100%	89,52
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.655.959,-	22.798.000,-	100 11 jenis 1 Jenis	92,46 11 jenis 1 Jenis
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	103.286.519,-	88.532.347,-	100 72 jenis	85,72 72 jenis
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.608.838,-	50.362.928,-	100 6 jenis	90,57 6 Jenis
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	360.000,-	100 1 Jenis	10,34 1 Jenis
			Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,-	13.000.000,-	100 2 Event	100 2 Event
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	939.990.000,-	845.513.388,-	100 14 orang	98,81 14 orang

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.277.417,-	434.253.071,-	100%	92,54
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.352.500,-	84.658.922,-	100 3 jenis	71,53 3 Jenis
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,-	349.594.149,-	100 24 jenis 14 Orang	99,62 24 jenis 14 Orang
2.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,-	600.000,-	100	4,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,-	600.000,-	100 2 ASN	4,00 2 ASN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.880.141,-	302.984.000,-	100	93,26
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.880.141,-	302.984.000,-	100	93,26
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.885.450,-	106.901.100,-	100	66,04
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	14.048.716,-	13.658.500,-	100 1 Unit	97,22 1 Unit

		Dinas Jabatan				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.236.734,-	60.720.100,-	100 10 unit 6 unit	59,39 10 unit 6 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000,-	32.522.500,-	100 7 Jenis	71,32 7 Jenis

Dari tabel analisis dapat diketahui bahwa Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mengampu 5 Kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD, dan Kinerja Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada tahun 2022 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.021.316,-	1.020.566.663,-	100%	89,52
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	24.655.959,-	22.798.000,-	100 11 jenis 1 Jenis	92,46 11 jenis 1 Jenis
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	103.286.519,-	88.532.347,-	100 72 jenis	85,72 72 jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.608.838,-	50.362.928,-	100 6 jenis	90,57 6 Jenis
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	3.480.000,-	360.000,-	100	10,34

	Peraturan Perundang-undangan			1 Jenis	1 Jenis
	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,-	13.000.000,-	100	100
				2 Event	2 Event
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	939.990.000,-	845.513.388,-	100	98,81
				14 orang	14 orang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.277.417,-	434.253.071,-	100%	92,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.352.500,-	84.658.922,-	100	71,53
				3 jenis	3 Jenis
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,-	349.594.149,-	100	99,62
				24 jenis	24 jenis
				14 Orang	14 Orang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,-	600.000,-	100	4,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,-	600.000,-	100	4,00
				2 ASN	2 ASN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah gbv	324.880.141,-	302.984.000,-		93,26
				100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.880.141,-	302.984.000,-		93,26
				100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.885.450,-	106.901.100,-	100	66,04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.048.716,-	13.658.500,-	100	97,22
				1 Unit	1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.236.734,-	60.720.100,-	100	59,39
				10 unit	10 unit
				6 unit	6 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000,-	32.522.500,-	100	71,32
				7 Jenis	7 Jenis

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Umum dan kepegawaian berjumlah Rp. 2.111.064.324,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.865.304.834,- atau sekitar 89,52%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian dilihat dari serapan anggaran berkatagori TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6	6	6	6	Persentase capaian sesuai target 100%
		Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5	5	5	5	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.140.506,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.999.501,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Peningkatan dari hasil sasaran melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD dalam indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen dengan hasil capaian 100 %

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Kurangnya pemahaman penyusunan laporan;
- 2) Jumlah SDM yang dirasa kurang.

Solusi :

- 1) Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait penyusunan dokumen perencanaan;
- 2) Perlu adanya SDM yang mumpuni.

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak berkoordinasi terkait pelaporan dengan bidang-bidang pengampu data;
- 2) Adanya pembagian jadwal yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Indikator 2 : Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 41.140.506,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan,

penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.999.501,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV, 2 Staf CPNS dan 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Kurang telitinya dalam penyusunan laporan;
- 2) Kurangnya pemahaman penyusunan laporan;

Solusi :

- 1) Perlu adanya pembagian tugas yang jelas terkait penyusunan laporan;
- 2) Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait penyusunan dokumen perencanaan;

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak berkoordinasi terkait penyusunan laporan;
- 2) Adanya pembagian jadwal yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Keg	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun. 2. Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.999.501,-	8.991.000,-	100	89,91
				4.999.501,-	4.172.000,-	100	83,45 6 Dokumen

		yang tersusun.	Perangkat Daerah			6 Dokumen	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.819.000,-	100 5 Laporan	96,38 5 Laporan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Perencanaan mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan dengan indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dan Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD yang tersusun.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Perencanaan pada tahun 2022 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.501,-	8.991.000,-	100	89,91
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.501,-	4.172.000,-	100 6 Dokumen	83,45 6 Dokumen
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.819.000,-	100 5 Laporan	96,38 5 Laporan

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Perencanaan berjumlah Rp. 9.999.501,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 8.991.000,- atau sekitar 89,91%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dilihat dari serapan anggaran berkategori TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kasubbag keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5	5	5	5	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyusunan laporan keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.086.951.510,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.290.154.465,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon IV dan 3 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 4) adanya pergantian sistem keuangan
- 5) SDM yang belum banyak mengetahui tentang sistem keuangan yang baru
- 6) Jaringan internet yang lambat

Solusi :

- 4) Adanya penetapan sistem mana yang harus digunakan
- 5) Adany pelatihan apabila ada pergantian sistem keuangan
- 6) Bandwith internet perlu ditambah

Rencana Aksi :

- 3) Lebih banyak koordinasi kepada SKPD yang mengurus masalah keuangan terkait penggunaan sistem
- 4) Penyediaan pelatihan bagi SDM

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.290.154.465,-	6.014.910.243,-	100	95,62
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.279.156.390,-	6.004.281.043,-	100 12 bulan	95,62 12 bulan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.998.075,-	10.629.200,-	100 5 dokumen	96,65 5 dokumen

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Keuangan mengampu 1 Kegiatan tupoksi jabatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Keuangan pada tahun 2022 dapat diuraikan ke dalam penjelasan pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.290.154.465,-	6.014.910.243,-	100	95,62
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.279.156.390,-	6.004.281.043,-	100 12 bulan	95,62 12 bulan
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.998.075,-	10.629.200,-	100 5 dokumen	96,65 5 dokumen

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Keuangan berjumlah Rp. 6.290.154.465,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 6.014.910.243,- atau sekitar 95,62%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Keuangan dilihat dari serapan anggaran berkategori SANGAT TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro.

a. Analisis

Akuntabilitas Kepala Bidang Perencanaan Makro dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)
		Persentase program yang memenuhi target	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Sasaran eselon III : Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD

Indikator 1 : Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD.

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 825.549.762,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 2 orang PTT.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar (Rp. 650.126.753,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf serta 2 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program RKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 - 1) Masih kurangnya pemahaman dari beberapa SKPD mengenai penyusunan perencanaan;
 - 2) Kurangnya SDM pada bidang.
- b. Solusi :
 - 1) Perlu adanya pelatihan mengenai penyusunan perencanaan;
 - 2) Perlu adanya penyediaan SDM yang sesuai kualifikasi.

c. Rencana aksi

agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator II : Persentase program yang memenuhi target

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD Persentase program yang memenuhi target 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 825.549.762,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 2 orang PTT.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar (Rp. 650.126.753,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf, serta 2 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase program yang memenuhi target	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100%)

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

- 1) Waktu pelaksanaan yang sering bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga perlu mencari waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan;

- 2) Data evaluasi yang diminta sering terlambat disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam hal ini SKPD kurang merespon terhadap permintaan tersebut;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu koordinasi dengan pimpinan tertinggi sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi;
- 4) Banyaknya tugas-tugas tambahan yang dilaksanakan sehingga kurang fokus terhadap tupoksi yang sudah ada.

b. Solusi :

- 1) Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadwal masing-masing;
- 2) Perlunya penjelasan dan penegasan terhadap SKPD tentang pentingnya data-data yang diminta tersebut oleh pimpinan agar permintaan data lebih diperhatikan;
- 3) Ke depan kegiatan monitoring dan evaluasi yang merupakan tupoksi Bappeda agar lebih diperhatikan lagi oleh pimpinan mengingat kegiatan ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan
- 4) Dapat mengatur ritme pekerjaan sehingga dapat seimbang antara tupoksi dengan tugas-tugas tambahan.

c. Rencana aksi

Perlu sosialisasi dan komunikasi yang intens kepada seluruh SKPD terkait kegiatan ini dan membuka komunikasi maupun pelatihan untuk menambah wawasan dalam pengoperasian aplikasi emonev.

Kepala Bidang Perencanaan Makro mengampu 1 Program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan sasaran Kinerjanya yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp. 825.549.762,-. Terkait realisasi dari program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program RKPD dengan RPJMD.	1. Persentase Keselarasan Program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang diada RPJMD. 2. Persentase program yang memenuhi Target.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	650.126.753,-	423.886.098,-	100	65,20
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	476.606.753,-	274.961.098,-	100	57,69
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten /Kota	476.606.753,- 1 dokumen 1 dokumen	274.961.098,- 1 dokumen 1 dokumen	100	57,69
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	98.645.000,-	100	98,65
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,- 1 dokumen	98.645.000,- 1 dokumen	100	98,65
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	73.520.000,-	50.280.000,-	100	68,39
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73.520.000,- 4 dokumen 4 dokumen	50.280.000,- 4 dokumen 4 dokumen	100	68,39

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 423.886.098,- atau sekitar 65,20% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Dari angka 65,20 ini maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan

akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan hanya berkatagori SEDANG dari sisi serapan anggaran, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan karena realisasi fisiknya mencapai 100%.

6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

a. analisis

Terkait dengan capaian kinerja atau akuntabilitas kinerja dan untuk pengukuran penilaian Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 100% untuk mencapai indikator ini didukung Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 360.827.472,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terealisasi sebesar 100% untuk mencapai

indikator ini didukung dengan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.018.731,- mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf serta 1 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) Perbedaan waktu pelaksanaan monev dengan SKPD terkait.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD

Indikator II : Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 100% untuk mencapai indikator ini didukung

dengan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 360.827.472,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.018.731,- mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf, serta 1 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentas Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) Perbedaan waktu pelaksanaan monev dengan SKPD terkait.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.

2) Mengirim surat permintaan jadwal money ke SKPD

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	37.018.731	31.522.800,-	100	85,15
		2. Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.999.472 2 laporan	1.800.000 2 laporan	100	90,02
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.879.472 1 laporan	9.415.000 1 laporan	100	67,83
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	16.389.647 1 laporan	15.883.400 1 laporan	100	96,91	
		Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4.750.140 1 laporan	4.424.400 1 laporan	100	93,14	

			Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
--	--	--	---	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengampu 1 program yaitu program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD, dan Persentase Meningkatkan capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ini dialokasikan anggaran sebesar 37.018.731,- dan berhasil direalisasikan sebesar 31.522.800,- atau sekitar 85,15%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja.

7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 360.827.472,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan jumlah anggaran sebesar sebesar Rp. 56.476.211,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang jabatan fungsional perencana muda dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Dalam penyampaian bahan penyusunan perencanaan SKPD lingkup koordinasi koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA masih sering terlambat dari jadwal yang ditentukan sehingga memperlambat penyusunan dokumen RKPD lingkup bidang ekonomi dan SDA dan masih terdapat ke kurang selarasan antara renja SKPD dengan RKPD sehingga memakan waktu kembali untuk menyelaraskannya.

a. Penyeragaman Renja SKPD dengan RKPD masih perlu pendampingan diluar jadwal asistensi / verifikasi dengan SKPD beberapa kali sehingga menyita banyak waktu

Solusi :

- 1) Membuat jadwal yang teratur terkait penyusunan renja SKD dengan rentang waktu lebih lama dengan konsekwensi penyampaian bahan penyusunan perencanaan (Renja SKPD) tepat waktu
- 2) Melakukan pembagian tugas internal bidang dalam pendampingan penyusunan Renja SKPD diluar jadwal asistensi / verifikasi
- 3) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal dan menceck list keselarasan Renja SKPD dengan RKPD.
- 2) Menyusun pembagian tugas pendampingan SKPD dilingkup bidang ekonomi.
- 3) Melakukan koordinasi baik melalui rapat, maupun whatshap group perencanaan lingkup bidng ekonomi dan SDA.

Indikator II : Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Pencapaian indikator II pada tahun 2021 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 360.827.472,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam terleasisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.373.231,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini 2 orang jabatan fungsional perencana muda dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembang	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi	80.373.231,-	46.774.610	100	58,20

unan Daerah.	dengan RKPD	2. Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.711.600,- 1 Laporan 5 laporan	37.084.610 1 Laporan 5 laporan	100	70,35
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.905.813,- 1 laporan	7.005.000 1 laporan	100	78,66
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.764.611,- 5 laporan	2.025.000 5 laporan	100	53,79
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.991.207,- 1 laporan	660.000 1 laporan	100	4,40

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Ekonomi dan SDA mengampu 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Untuk Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dialokasikan anggaran sebesar Rp.

80.373.231,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 46.774.610,- atau sekitar 58,20%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Sub koordinasi Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya. Pada kegiatan yang diampu oleh bidang ekonomi lebih mengakomodir fasilitasi perencanaan SKPD pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yaitu SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian , Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dilihat dari serapan anggaran berkategori Sedang. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya.

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup idang Sosial Budaya	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 146.151.236,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.085.036,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang pejabat fungsional Perencana Muda dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) keterbatasan personil pada bidang sosial dan budaya serta padatnya kegiatan pada masing-masing SKPD pada lingkup pokja Sosial dan Budaya terutama yang berkenaan dengan fisik /pembangunan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dimana rentang waktu pelaksanaannya seringkali berbenturan dengan jadwal siklus perencanaan.
- 2) Minimnya data Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dikarenakan koordinasi dan komunikasi yang belum terbangun dengan baik serta rentang waktu pelaksanaan yang seringkali berbenturan dengan rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh bidang social dan budaya.

Solusi :

- 1) Menyusun Jadwal dan Melakukan pembagian tugas kembali secara lebih detail pada internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan SKPD sehingga didapatkan data awal pentargetan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

Indikator II : Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup idang Sosial Budaya

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 146.151.236,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup idang Sosial Budaya terleasisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.085.036,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang Pejabat Fungsional Perencana Muda dan 2 orang ASN serta 1 orang PTT, Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup idang Sosial Budaya	100	100%	100	100	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) keterbatasan personil pada bidang sosial dan budaya serta padatnya kegiatan pada masing-masing SKPD pada lingkup pokja Sosial dan Budaya terutama yang berkenaan dengan fisik /pembangunan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dimana rentang waktu pelaksanaannya seringkali berbenturan dengan jadwal siklus perencanaan.
- 2) Minimnya data Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dikarenakan koordinasi dan komunikasi yang belum terbangun dengan baik serta rentang waktu pelaksanaan yang seringkali berbenturan dengan rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh bidang sosial dan budaya.

Solusi :

- 1) Menyusun Jadwal dan Melakukan pembagian tugas kembali secara lebih detail pada internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan SKPD sehingga didapatkan data awal pentargetan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	29.085.036	20.607.600	100	70,85
		2. Persentase Meningkatkan	Koordinasi Penyusunan Dokumen	4.121.889	3.383.500	100	82,09

		nya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 laporan	4 laporan		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.439.775 1 dokumen	4.986.900 1 dokumen	100	67,03
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.954 4 laporan	3.923.300 4 laporan	100	78,47
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.523.418 1 laporan	8.313.900 1 laporan	100	66,39

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Sosial Budaya mengampu 1 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD, dan Persentase

Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya. Pada Bidang Sosial Budaya yang didalamnya terdapat kegiatan yang mengakomodir fasilitasi perencanaan SKPD sub bidang Politik, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD yang tergabung dalam sub bidang tersebut, di Bidang Sosial Budaya juga menjadi koordinator Kabupaten pada Program Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan Program dari Pemerintah Pusat.

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.085.036,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 20.607.600,- atau sekitar 70,85%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dilihat dari serapan anggaran berkategori SEDANG dikarenakan ada kegiatan yang dilakukan melalui media virtual. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

9. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang

Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	100	100%	100	100%	Persentase sesuai dengan target 100%

Sasaran eselon III : Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan Daerah

Indikator 1 : Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan

Pencapaian indikator I pada tahun 2021 target Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 347.461.130,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.236.413,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang ASN serta 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2021		2022		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Meningkatnya implementasi hasil penelitian pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	100	100%	100	100%	Persentase capaian menurun dibandingkan target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) kurangnya kerjasama dari skpd terkait pemberian data sesuai dengan kajian yang dikerjakan.
- 2) Kurang SDM dibidang penelitian dan pengembangan terkait dengan tugasnya.

Solusi :

- 1) Lebih instensif dalam berkoodinasi dengan SKPD dalam hal permintaan data dukung
- 2) memberikan pelatihan kepada SDM terkait tugasnya.

Rencana Aksi :

- 1) penyediaan SDM yang sesuai dengan kualifikasi dan pemberian pelatihan ataupun workshop
- 2) membuka rapat koordinasi dengan SKPD terkait sebelum melaksanakan kegiatan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan mengampu 1 program yaitu Program Penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatkan

Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan.

Hasil aplikasi inovasi daerah yang bertujuan implementasi inovasi di Kabupaten Tanah Laut berbasis web, sebagai tindak lanjut permendagri No. 104 Tahun 2018, tentang penilaian pemberian penghargaan/ inovasi daerah dan Review masterplan Pendidikan Kabupaten Tanah laut Tahun 2016 – 2023.

Untuk Program Penelitian dan pengembangan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.236.413,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 32.210.600,- atau sekitar 72,81%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	44.236.413,-	32.210.600,-	72,81	100,00
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	15.010.000,-	5.286.600,-	35,22	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	15.010.000,-	5.286.600,-	35,22	100
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	29.226.413,-	26.924.000	92,12	100
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	29.226.413,-	26.924.000	92,12	100

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan dilihat

dari serapan anggaran berkategori TINGGI dikarenakan adanya perhitungan ulang yang mengakibatkan pengurangan anggaran dalam penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja dan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan gagal di lelangkan atau dilaksanakan. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkategori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022, Bappeda melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan . Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Bappeda Tahun 2022.

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.976.937.090,-	8.411.218.290,-	93,79	95,24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.501,-	9.999.501,-	89,91	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.501,-	4.999.501,-	83,45	100
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	96,38	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.809.154.465,-	6.290.154.465,-	95,62	100
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.799.156.390,-	6.279.156.390,-	95,62	100
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.998.075,-	10.998.075,-	96,65	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,-	15.000.000,-	4,00	66,67
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,-	15.000.000,-	4,00	66,67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.061.246,-	1.140.021.316,-	89,52	100
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.655.959,-	24.655.959,-	92,46	100

	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.434.449,-	103.286.519,-	85,72	100
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.500.838,-	55.608.838,-	90,57	100
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	3.480.000,-	10,34	100
	5. Penyediaan Bahan/Material	0,-	13.000.000,-	100	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.990.000,-	939.990.000,-	89,95	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.524.698,-	324.880.141,-	93,26	100
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.524.698,-	324.880.141,-	93,26	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.277.417,-	469.277.417,-	92,54	100
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.352.500,-	118.352.500,-	71,53	100
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,-	350.924.917,-	99,62	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.943.647,-	161.885.450,-	66,04	100
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.998.152,-	14.048.716,-	97,22	100
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.195.495,-	102.236.734,-	59,39	100
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-	45.600.000,-	71,32	100
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	677.911.641,-	650.126.753,-	65,20	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	495.391.641,-	476.606.753,-	57,69	100
	1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	495.391.641,-	476.606.753,-	57,69	100
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	100.000.000,-	98,65	100

	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100.000.000,-	100.000.000,-	98,65	100
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	82.520.000,-	73.520.000,-	68,39	100
	1. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	82.520.000,-	73.520.000,-	68,39	100
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	116.141.641,-	146.476.998,-	67,52	100
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	39.999.289,-	29.085.036,-	70,85	100
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.900,-	4.121.889,-	82,09	100
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.999.775,-	7.439.775,-	67,03	100
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.954,-	4.999.954,-	78,47	100
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.999.660,-	12.523.418,-	66,39	100
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	38.755.096,-	80.373.231,-	58,20	100
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.846,-	52.711.600,-	70,35	100
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.999.432,-	8.905.813,-	78,66	100
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.764.611,-	3.764.611,-	53,79	53

	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.991.207,-	14.991.207,-	4,40	100
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	37.387.256,-	37.018.731,-	85,15	100
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.988,-	1.999.472,-	90,02	100
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.050.988,-	13.879.472,-	67,83	100
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.565.140,-	16.389.647,-	96,91	100
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.870.140,-	4.750.140,-	93,14	100
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	135.905.488,-	44.236.413,-	72,81	100
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	40.586.701,-	0,-	0	0
	1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	40.586.701,-	0,-	0	0
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	45.320.000,-	15.010.000,-	35,22	100
	1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	45.320.000,-	15.010.000,-	35,22	100
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	49.998.787,-	29.226.413,-	92,12	100
	1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	49.998.787,-	29.226.413,-	92,12	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, Bappeda mengelola anggaran sebesar Rp. 9.252.058.454,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.444.207.785,- atau sekitar 91,27%. Dengan menggunakan skala penilaian sebagaimana telah dicantuman diatas

dapat dikatakan bahwa capaian realisasi Bappeda masih bernilai SEDANG TINGGI, meskipun sebenarnya diharapkan dapat lebih baik lagi. Besaran capaian ini banyak terpengaruh oleh situasi dan kondisi Pandemi sehingga tupoksi Bappeda yang lebih banyak melakukan koordinasi dalam bentuk rapat-rapat secara tatap muka dan sebagian yang lain melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga yang didalamnya ada dana narasumber menjadi terkendala dengan berbagai pembatasan untuk menghindari memburuknya situasi akibat pandemi. Dengan minimnya pertemuan tatap muka dan kerjasama tersebut berpengaruh pada serapan anggaran yang bisa direalisasikan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2022 Bappeda mengampu 4 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Bappeda. Sasaran Strategis Bappeda meliputi 6 Sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.
- 2) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya
- 3) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.
- 4) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- 5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sedangkan 4 program tersebut meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Terkait dengan anggaran dan realisasi dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.411.218.290,-	93,79	95,24
2.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	44.236.413,-	72,81	100
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	37.018.731,-	85,15	92,79
4.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	650.126.753,-	65,20	100
5.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80.373.231,-	58,20	100
6.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	29.085.036,-	70,85	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran dan realisasi masing-masing sasaran dan programnya yaitu :

- 1) Sasaran I : Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program RKPd dengan RPJMD.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 650.126.753,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 65,20%.

- 2) Sasaran II : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 29.085.036,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 70,85%.

- 3) Sasaran III : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 80.373.231,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 58,20%.

- 4) Sasaran IV : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 37.018.731,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 85,15%.

- 5) Sasaran V : Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Penelitian dan Pengembangan. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 44.236.413,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 72,81%.

- 6) Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 8.411.218.290,- dan terealisasi sebesar 93,79%.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022.

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2021 dan Tahun 2022. Perbandingan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara paralel per program, kegiatan dan Sub Kegiatan karena ada sebagian program atau kegiatan yang ada di tahun 2021 tetapi tidak ada lagi di tahun 2022. Demikian pula sebaliknya, ada program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di tahun 2021 tetap sama di tahun 2022.

Mengingat bahwa perbandingan ditujukan untuk melihat efisiensi capaian anggaran maka semua Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengandung kode NA akan diabaikan kecuali kalau hanya terjadi perubahan numenklatur saja, bukan karena memang tidak ada program atau kegiatan dan Sub Keegiatannya di kedua tahun yang diperbandingkan. Untuk melihat perbandingan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.043.643.090,	8.411.218.290		93,79
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.140.506,-	9.999.501,-	89,38	89,91
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.983.450,-	4.999.501,-	76,48	83,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		31.157.056,-		93,52	96,38
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-	5.000.000,-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.086.951.510, -	6.290.154.465		95,62
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.072.865.190, -	6.279.156.390, -		95,62

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.086.320,-	10.998.075,-		96,65
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,-	15.000.000,-		4,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,-	15.000.000,-		4,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.704.670,-	1.140.021.316,-		89,52
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.718.580,-	24.655.959,-		89,52
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.198.890,-	103.286.519,-		85,72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.898.800,-	55.608.838,-		90,57
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.398.400,-	3.480.000,-		10,34
	NA	Penyediaan Bahan/Material	NA	13.000.000,-		100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718.490.000,-	939.990.000,-		89,95
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.296.840,-	324.880.141		93,26
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.296.840,-	324.880.141,-		93,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.512.208,-	469.277.417,-		92,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.887.400,-	118.352.500,-		71,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.624.808,-	350.924.917,-		99,62
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.037.356,-	161.885.450,-		66,04

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.200.000,-	14.048.716,-		97,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.587.356,-	102.236.734,-		59,39
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-	45.600.000,-		71,32
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	167.500.000,-	NA		NA
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825.549.762,-	650.126.753		65,20
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	569.566.136,-	476.606.753		57,69
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	462.942.536	476.606.753,-		57,69
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		9.000.000,-			
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		18.000.000,-			
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		73.625.000,-			
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		5.998.600,-			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-	100.000.000,-		98,65
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,-	100.000.000,-		98,65
	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.983.626,-	73.520.000,-		68,39
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	255.983.626,-	73.520.000,-		68,39

	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	360.827.472,-	146.476.998,-		67,52
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	146.151.236,-	29.085.036,-		70,85
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.882.946,-	4.121.889,-		82,09
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		3.683.210,-			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.429.240,-	7.439.775,-		67,03
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.395.900,-	4.999.954,-		78,47
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		10.000.000,-			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.759.940,-	12.523.418,-		66,39
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	246.401.050,-	80.373.231		58,20
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.820.480,-	14.991.207,-		4,40

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.190.540,-	3.764.611,-		53,79
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.679.800,-	52.711.600,-		70,35
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		0,-			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.504.320,-	8.905.813,-		78,66
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		37.018.731,-		85,15
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.744.220,-	1.999.472,-		90,02
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.675.400,-	13.879.472,-		67,83
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.179.400,-	16.389.647,-		96,91
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	49.882.076,-	4.750.140,-		93,14
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	347.461.130	44.236.413,-		72,81
	NA	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	NA	0		0

	NA	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	NA	0		0
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	347.461.130,-	15.010.000,-		35,22
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	NA	347.461.130,-	NA		NA
	NA	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	NA	15.010.000,-	NA	35,22
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	NA	0,-	NA	0,-	NA
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	NA	0,-	NA	0,-	NA
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	NA	0,-	NA	0,-	NA
	NA	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	NA	29.226.413	NA	92,12
	NA	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	NA	29.226.413,-	NA	92,12

2. Karena masih terbawa masa Pandemi Covid-19 di tahun 2022 sehingga SKPD harus melakukan kegiatan yang bersifat online/daring.
3. Koordinasi dengan SKPD harus terus ditingkatkan sehingga peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan SKPD semakin dapat diwujudkan dan kinerja Bappeda dan SKPD dapat lebih meningkat.
4. Mengingat perencanaan yang dihasilkan sangat tergantung dengan kualitas SDM Perencananya maka kualitas SDM perencana ini harus terus dilakukan. Perlu dilakukan bimtek kepada SDM perencana karena sistem perencanaan yang berlaku sekarang yaitu SIPD belum dikuasai dengan optimal oleh SDM Perencana se Kabupaten.

Lampiran :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

LAPORAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.252.058.454	8.440.290.985	91,23	99,21
5.01	PERENCANAAN				9.207.822.041	8.408.080.385	91,31	98,41
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	75 nilai		8.411.218.290	7.885.289.277	93,75	95,24
5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%		9.999.501	8.991.000	89,91	100,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	4.999.501	4.172.000	83,45	100,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5.000.000	4.819.000	96,38	100,00
5.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		6.290.154.465	6.010.993.443	95,56	100,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	6.279.156.390	6.000.364.243	95,56	100,00
5.01.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5 Dokumen	5 dokumen	10.998.075	10.629.200	96,65	100,00
5.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%		15.000.000	600.000	4,00	66,67
5.01.01.2.05.11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 ASN	2 ASN	15.000.000	600.000	4,00	66,67

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%		1.140.021.316	1.020.566.663	89,52	100,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	(1) 11 jenis	11 jenis	24.655.959	22.798.000	92,46	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	(2) 1 Jenis	(2) 1 Jenis				
5.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	72 jenis	72 jenis	103.286.519	88.532.347	85,72	100,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	6 jenis	6 jenis	55.608.838	50.362.928	90,57	100,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	3.480.000	360.000	10,34	100,00
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pameran	2 event	2 event	13.000.000	13.000.000	100,00	100,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(1) jumlah Perjalanan Dinas, (2) Jumlah Rapat	(1) 561 Kali (2) 200 Kali	200 kali 60 kali	939.990.000	845.513.388	89,95	100,00
5.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		324.880.141	302.984.000	93,26	100,00
5.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya	25 Jenis	25 jenis	324.880.141	302.984.000	93,26	100,00
5.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		469.277.417	434.253.071	92,54	100,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3 jenis	3 jenis	118.352.500	84.658.922	71,53	100,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	(1) jumlah jenis alat kebersihan, (2) jumlah PTT yang dibayarkan honoronya	(1) 24 jenis, (2) 14 Orang	24 jenis 14 orang	350.924.917	349.594.149	99,62	100,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		161.885.450	106.901.100	66,04	100,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	14.048.716	13.658.500	97,22	100,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	(1) Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (2) Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara	(1) 10 Unit (2) 6 Unit	10 unit 6 unit	102.236.734	60.720.100	59,39	100,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara	7 Jenis	7 jenis	45.600.000	32.522.500	71,32	100,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	85%		650.126.753	423.886.098	65,20	100,00
5.01.02.2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase capaian kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	100%		476.606.753	274.961.098	57,69	100,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	(1) Jumlah Dokumen RKPD, (2) Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	(1) 1 dokumen, (2) 1 dokumen	(1) 1 dokumen, (2) 1 dokumen	476.606.753	274.961.098	57,69	100,00
5.01.02.2.02	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		100.000.000	98.645.000	98,65	100,00
5.01.02.2.02.01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	98.645.000	98,65	100,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.03.2.02	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%		80.373.231	46.774.610	58,20	100,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	(1) Jumlah Laporan Hasil FGD Analisa Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut (2)Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	(1) 1 Laporan (2) 5 laporan	(1) 1 Laporan (2) 5 laporan	52.711.600	37.084.610	70,35	100,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	1 laporan	1 laporan	8.905.813	7.005.000	78,66	100,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang.Dunia usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 laporan	5 laporan	3.764.611	2.025.000	53,79	100,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Bang.Dunia Usaha , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	14.991.207	660.000	4,40	100,00
5.01.03.2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		37.018.731	31.522.800	85,15	100,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	2 laporan	2 laporan	1.999.472	1.800.000	90,02	100,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	13.879.472	9.415.000	67,83	100,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 laporan	1 laporan	16.389.647	15.883.400	96,91	100,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 laporan	1 laporan	4.750.140	4.424.400	93,14	100,00
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				44.236.413	32.210.600	72,81	100,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	75%		44.236.413	32.210.600	72,81	100,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase capaian hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%		-	-	0,00	#DIV/0!
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	100%		-	-	0,00	,
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%		15.010.000	5.286.600	35,22	100,00
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15.010.000	5.286.600	35,22	100,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian hasil kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%		29.226.413	26.924.000	92,12	100,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Software Inovasi Daerah	1 software	1 software	29.226.413	26.924.000	92,12	100,00

Pelaihari, 04 Januari 2023

Kepala Bappeda



Andris Evony, S.STP,M.Si

NIP. 19790928 199711 1 001